

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE*
GOVERNANCE SECARA INTERNAL DAN
EKSTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN :
STUDI KASUS DI BANK YANG TERDAFTAR DI BEI
2006-2009**



SKRIPSI

Disusun oleh :

**YENNY WIDYA HASTUTI
NIM. C2C006157**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Yenny Widya Hastuti
Nomor Induk Mahasiswa : C2C006157
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*
Secara Internal dan Eksternal terhadap Kinerja
Keuangan: Studi Kasus di Bank yang Terdaftar di
BEI 2006-2009
Dosen Pembimbing : H. Tarmizi Achmad, MBA., PhD., CPA., Akt

Semarang, April 2011

Dosen Pembimbing,

H. Tarmizi Achmad, MBA., PhD., CPA., Akt
NIP. 195504181986031001

ABSTRAKSI

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good corporate governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Oleh karena itu, BAPEPAM menekankan perusahaan-perusahaan *go public* untuk mempraktikkan *corporate governance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh mekanisme *corporate governance* secara internal dan eksternal terhadap kinerja keuangan. Hipotesis yang diajukan (1) komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, (2) kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, (3) kepemilikan manajemen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, dan (4) kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 85 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dari tahun 2006 – 2009, dan diperoleh secara *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan menggunakan dokumentasi laporan keuangan. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi ganda dengan *dummy*.

Hasil penelitian adalah : (1) Hipotesis pertama **ditolak** karena komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan; (2) Hipotesis kedua **ditolak** karena kepemilikan institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan; (3) Hipotesis ketiga **ditolak** karena kepemilikan manajemen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan; dan (4) Hipotesis keempat **diterima** karena kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan

Kata kunci : komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan institusional, kualitas audit, kinerja keuangan, dan bank

ABSTRACT

Implementation and management of good corporate governance, better known by good corporate governance is a concept that emphasizes the importance of shareholder rights to obtain information with true, accurate, and timely, therefore, emphasize BAPEPAM companies go public to practice good corporate governance . This study aims to determine how corporate governance mechanisms influence internally and externally to financial performance. The hypothesis (1) independent commissioner has negative and significant impact on financial performance, (2) institutional ownership has positive and significant impact on financial performance, (3) ownership and management of a significant negative effect on financial performance, and (4) positive effect on audit quality and significant impact on financial performance.

This research is descriptive quantitative research using the 85 companies listed on the BEI banking from 2006 - 2009, and obtained by purposive sampling. Data was collected using documentation of financial statements. Furthermore, the data were analyzed using multiple regression analysis with dummy.

The results are: (1) The first hypothesis is rejected for an independent commissioner has negative and significant impact on financial performance, (2) The second hypothesis was rejected because of institutional ownership have positive and not significant to the financial performance, (3) The third hypothesis was rejected because of negative influence management ownership and no significant effect on financial performance, and (4) The fourth hypothesis was accepted because the quality of audits has positive and significant impact on financial performance

Keywords : independent commissioner, institutional ownership, institutional ownership, audit quality, financial performance, and bank

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

-MOTTO-

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki kehancuran suatu kaum, maka tidak ada yang sanggup mencegahnya, dan tidak ada perlindungan mereka selain dari Allah.

(Q.S. Ar -Ra'd : 11)

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar
(Al-Baqarah : 153)

"Mencoba,mencoba,dan terus mencoba..!
Berusaha,berusaha,dan terus berusaha..!
Lakukan,lakukan,dan terus lakukan..!
Berdo'a,berdo'a,dan
terus berdo'a..! Sampai tercapai cita -citamu dan
berhasil meraih kesuksesanmu...!!!

-PERSEMBAHAN-

Papa & Mamaku tercinta Suparman & Henny Yuliani
Adik2ku tersayang Ferry Aji P & Renny Putri O

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayah-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE SECARA INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN: STUDI KASUS DI BANK YANG TERDAFTAR DI BEI 2006-2009**”, untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan pendidikan jenjang program stars I (Sarjana) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis sangat bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini dan penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari pihak lain, maka skripsi ini tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu, atas segala bantuan bimbingan serta dukungan moril yang diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, MSi.,Akt.,PhD. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifin S., MCom, (Hons) Akt , selaku Dosen wali yang bersedia meluangkan waktunya bagi penulis untuk memberikan segala masukan yang bermanfaat
3. Bapak Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, PhD, Akt., selaku Dosen Pembimbing penulis yang sabar membimbing, memberi masukan, dan bersedia berbagi

ilmu dengan penulis. Penulis mendapatkan berbagai macam ilmu yang kelak akan sangat bermanfaat.

4. Seluruh Dosen Pengajar, Staf, serta karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas pengabdianya pada fakultas tercinta.
5. Ibunda, Henny Yuliani dan Ayahanda, Suparman terkasih dan tersayang. Do'a dan dukungan kalian adalah anugerah terindah bagi penulis dalam menghadapi kehidupan di dunia ini.
6. Adikku tersayang, Ferry Aji Permana Dan Renny Putri Octaviany. Semangat dan dukungannya sangat berharga bagi penulis, maka jangan pernah berhenti berjuang demi kebahagiaan kedua orang tua kita.
7. Saudara-saudaraku tercinta, Om, Tante, Sepupu, (Keluarga Buluwati).
8. Sahabat-sahabatku Aa' Adoo, "CENDANA FAMZ" (Ninu, Lina, Citra, Reisa, Ayu, Yonda, Gpenk, Bodok, Ridho, Andra, Day, dl), Gita, Yuyun, Rayu, Sindi, yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
9. Mbak Prista dan Mbak Uki, terima kasih untuk pelajaran dan jawaban yang diberikan pada setiap pertanyaan yang diajukan.
10. Teman-teman KKN "KUMPULREJO" (Nilam, Dena, Mak'e selphrida, Mbah'e Bayu, Kordes Hendra, Dite, dll), terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.
11. Teman-teman seangkatan Akuntansi 2006 (Mega, Rendy, Nando, Ali, dhimas), dan seluruh pihak yang tidak biasa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan memberikan sumbangsih kepada Universitas Diponegoro

Semarang, Mei 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
ABSTRAKSI	iii
ABSTRACT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1.4. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Landasan Teori	16
2.1.1. Teori Agensi.....	16
2.1.2. <i>Corporate Governance</i>	19
2.1.3. Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	24
2.1.4. Kinerja Keuangan	40
2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis	41
2.2.1. Komisaris Independen dan Kinerja Keuangan.....	41
2.2.2. Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan	45
2.2.3. Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Keuangan.....	46
2.2.4. Kualitas Audit dan Kinerja Keuangan	46

BAB	III METODE PENELITIAN	49
	3.1. Jenis dan Desain Penelitian.....	49
	3.2. Variabel Penelitian.....	50
	3.2.1 Variabel Tergantung	50
	3.2.2 Variabel Bebas	50
	3.3. Populasi dan Sampel.....	52
	3.4. Metode Pengumpulan Data.....	53
	3.5. Metode Analisis Data.....	53
	3.5.1. Analisis Deskriptif	53
	3.5.2. Analisis Regresi Ganda dengan <i>Dummy</i>	54
BAB	IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
	4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	59
	4.2. Hasil Analisis Deskriptif.....	59
	4.3. Hasil Analisis Regresi Ganda dengan <i>Dummy</i>	61
	4.3.1. Hasil Uji Asumsi Klasik	61
	4.3.2. Hasil Uji Hipotesis.....	64
	4.4. Pembahasan.....	68
BAB	V PENUTUP	75
	5.1. Kesimpulan	75
	5.2. Implikasi Penelitian	76
	5.3. Keterbatasan Penelitian.....	76
	5.4. Agenda Penelitian Mendatang	77
	DAFTAR PUSTAKA	79
	LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas Berdasarkan <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	62
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinieritas	63
Tabel 4.4	Hasil Uji Glejser	64
Tabel 4.5	Hasil Analisis Regresi Ganda dengan <i>Dummy</i>	64
Tabel 4.6	Hasil Uji F.....	67
Tabel 4.7	Hasil Koefisien Determinasi	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Kerangka Pemikiran Teoritis Hasil Uji F	48
Gambar	4.1	<i>Normal P-Plot</i>	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good corporate governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *good corporate governance* (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager dalam Darmawati, 2004).

Kajian mengenai *corporate governance* meningkat dengan pesat seiring dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron, Tyco, Worldcom, Merck, Global Crossing mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett, dkk., 2006) yang melibatkan akuntan, salah satu elemen penting dari *good corporate governance*. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005) juga melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi.

Dengan melihat beberapa contoh kasus tersebut, sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang efektivitas penerapan *corporate governance*.

Bukti menunjukkan lemahnya praktik *corporate governance* di Indonesia mengarah ada defisiensi pembuatan keputusan dalam perusahaan dan tindakan perusahaan (Alijoyo, dkk., 2004). *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.

Corporate governanace merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati, dkk., 2004).

Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam paradigma ini, Dewan Komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham, yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Demikian juga Komite Audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara

kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance (Improving Audit Committee Performance: What Works Best - A Research Report prepared by Pricewaterhouse Coopers, the Institute of Internal Auditors Research Foundation)*.

Mengingat bahwa akhir-akhir ini *Corporate Governance* merupakan salah satu topik pembahasan sehubungan dengan semakin gencarnya publikasi tentang kecurangan (*fraud*) maupun keterpurukan bisnis yang terjadi sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan suatu tanda tanya tentang kecukupan (*adequacy*) *Corporate Governance*. Demikian pula halnya tentang kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dipertanyakan. Oleh karena itu adalah suatu hal yang wajar dan penting bagi semua pihak yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan untuk mengupayakan mengurangi bahkan menghilangkan krisis kepercayaan (*credibility gap*) dengan mengkaji kembali peranan masing-masing dalam proses penyusunan tersebut.

Ada beberapa peraturan terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* baik yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), maupun Keputusan Menteri BUMN. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum serta Surat Edaran Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Bank

berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap aktivitas usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) juga sudah mensyaratkan keberadaan komisaris independen dan komite audit bagi semua perusahaan publik. Ditambah lagi, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 117/2002 sudah mensyaratkan hal yang sama untuk BUMN. Rujukan-rujukan tentang praktik-praktik terbaik sudah tersedia luas. Misalnya, melalui FCGI untuk rujukan praktik terbaik penerapan manajemen risiko dan komite audit serta melalui *Indonesian Society of Independent Commissioners* (ISICOM) untuk praktik terbaik fungsi dan peran komisaris independen.

Pilot Project Self Assessment merupakan salah satu mekanisme yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat GCG perbankan di Indonesia. Proyek ini September 2007 dilakukan terhadap 130 bank termasuk kantor cabang bank asing. Penilaian dilakukan pada 13 aspek. Dari 130 bank yang ditelaah, 12 bank memperoleh kategori sangat baik, 76 bank baik, 39 bank cukup baik, dan 3 bank kurang baik. Lebih lanjut, hasil evaluasi BI menyebutkan, 53,5 persen bank di Indonesia belum memiliki Komisaris Independen, 30,7 persen bank belum membentuk komite secara lengkap, dan 18,8 persen bank belum memiliki jumlah komisaris yang lebih besar dari jumlah direksi. Dari penelitian Bank Indonesia tersebut menunjukkan bahwa GCG masih sebatas peraturan belum menjadi budaya organisasi, 69,3 persen bank yang beroperasi di Indonesia belum mematuhi ketentuan *good corporate governance* (GCG) (Ghufron, 2008).

Sehubungan dengan itu dibutuhkan ketegasan pihak-pihak yang terkait. Contoh, baru-baru ini Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) memberikan sanksi kepada tiga perusahaan yang terdaftar di Bursa. Salah satu diantaranya terbukti melaksanakan transaksi pinjaman senilai Rp. 10 milyar kepada 64% pemegang sahamnya tanpa persetujuan dari pemegang saham lainnya. Hal ini dianggap melanggar ketentuan BAPEPAM mengenai benturan kepentingan (Bisnis Indonesia, "Baepam kenakan sanksi kepada 3 emiten dan 4 sekuritas". www.bisnis.com).

Institusi keuangan perbankan memiliki sifat usaha spesifik (*nature of the firm*) yang membedakannya dari institusi non-keuangan (Macey dan O'Hara dalam Supriyatno, 2006). Sifat usaha spesifik tersebut mendorong topik penelitian dalam industri perbankan dewasa ini mengarah pada masalah *corporate governance*, terlebih lagi setelah beberapa negara Asia terkena krisis finansial. (Arun dan Turner dalam Supriyatno, 2006). Banyak ahli yang berpendapat bahwa kelemahan didalam penerapan *corporate governance* merupakan salah satu sumber kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya perekonomian negara-negara tersebut pada tahun 1997 dan 1998 (Husnan, 2001).

Corporate governance pada industri perbankan di negara berkembang seperti halnya Indonesia pada pasca krisis keuangan menjadi semakin penting mengingat beberapa hal. Pertama, bank menduduki posisi dominan dalam sistem ekonomi, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (King dan Levine, 1993). Kedua, di negara yang ditandai oleh pasar modal yang belum berkembang, bank berperan utama bagi sumber pembiayaan perusahaan. Ketiga, bank

merupakan lembaga pokok dalam mobilisasi simpanan nasional. Keempat, liberalisasi sistem perbankan baik melalui privatisasi maupun deregulasi ekonomi menyebabkan manajer bank memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menjalankan operasi bank (Arun dan Turner dalam Supriyatno 2006).

Sebagaimana dikemukakan oleh Caprio dan Levine (2002), terdapat dua hal yang saling terkait menyangkut lembaga intermediasi keuangan perbankan yang berpengaruh terhadap *corporate governance*. Pertama, bank merupakan sektor usaha yang tidak-transparan, sehingga memungkinkan terjadinya masalah keagenan. Kedua, bank merupakan sektor usaha yang memiliki tingkat regulasi tinggi yang dalam hal tertentu justru menghambat mekanisme *corporate governance*. Masalah keagenan dalam sektor keuangan-perbankan pada hakekatnya dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama masalah keagenan akibat utang (*debt agency problem*) dan kedua masalah keagenan akibat pemisahan kepemilikan dan pengendalian (*separation of ownership and control*).

Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan

sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*) (Haris, 2004). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) (Richardson, 1998).

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan tersebut. Pertama, dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*) (Jensen dan Meckling, 1976), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Kedua, kepemilikan saham oleh investor institusional. Moh'd, dkk dalam Midiastuti dan Mackfudz (2003) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Ketiga, melalui peran monitoring oleh dewan komisaris (*board of directors*). Dechow, dkk (1996) dan Beasley (1996) menemukan hubungan yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan. Nama besar, kemauan dan itikad baik saja belum cukup untuk membangun dewan komisaris berkelas duania, dibutuhkan struktur, sistem dan proses yang memadai. Dewan komisaris harus berperan aktif, independen dan konstruktif (Alijoyo, 2004).

Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan (Kieso dan Weygandt, 1995), sehingga laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang besar. Dalam hal ini arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang. Arus kas (*cash flow*) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan (Pradhono, 2004). *Cash flow return on assets* (CFROA) merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan CFROA tidak terikat dengan harga saham (Cornett, dkk., 2006).

Laporan keuangan sebagai produk informasi yang dihasilkan perusahaan, tidak terlepas dari proses penyusunannya. Kebijakan dan keputusan yang diambil dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan akan mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan. Menurut Theresia (2005) manajemen laba merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Manajemen akan memilih metode tertentu untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan motivasinya. Hal ini akan mempengaruhi kualitas kinerja yang dilaporkan oleh manajemen (Boediono, 2005).

Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh return atas investasinya dengan benar. *Corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporat. *Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (FCGI, 2003).

Penelitian mengenai efektifitas *corporate governance* dalam melindungi investor di Indonesia telah banyak dilakukan, antara lain: Midiastuty dan Machfoedz (2003), Veronica dan Bachtiar (2004), Wedari (2004), dan Wilopo (2004), Boediono (2005), Veronica dan Utama (2005), Sugiarta (2004). Akan tetapi penelitian ini mencakup perusahaan yang listing di BEJ kecuali perusahaan perbankan. Oleh karena itu, perlu suatu penelitian tentang efektifitas *corporate governance* di industri perbankan karena karakteristik industri perbankan yang berbeda dengan industri lainnya.

Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lain, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria CAR minimum. Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau tidak). Oleh karena itu, manajer mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba upaya perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh BI (Setiawati dan Na'im, 2001, dan Rahmawati dan Baridwan,

2006). Setiawati dan Na'im (2001), Rahmawati (2006), dan Rahmawati dan Baridwan (2006) menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia melakukan manajemen laba untuk memenuhi kriteria BI tersebut. Setiawati dan Na'im (2001) berargumen bahwa laporan keuangan yang telah direkayasa oleh manajemen dapat mengakibatkan distorsi dalam alokasi dana. Selain itu, industri perbankan merupakan industri "kepercayaan". Jika investor berkurang kepercayaannya karena laporan keuangan yang bias karena tindakan manajemen laba, maka mereka akan melakukan penarikan dana secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan *rush*. Oleh karena itu, perlu suatu mekanisme untuk meminimalkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah praktik *corporate governance*.

Berbagai tulisan memaparkan konsekuensi negatif dari *weak governance system* dan berusaha mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang dapat meningkatkan implementasi *corporate governance*. Iskander dan Chamlou (2000) dalam Alijoyo (2004) misalnya, menyampaikan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan negara lain terjadi bukan hanya akibat faktor ekonomi makro namun juga karena lemahnya *corporate governance* yang ada di negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (*auditing*) yang belum mapan, pasar modal yang masih *under-regulated*, lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas.

Dengan bisa terukurnya praktik *corporate governance* di tingkat perusahaan, banyak penelitian yang berhasil menemukan adanya hubungan positif

antara *corporate governance* dengan nilai/kinerja perusahaan (antara lain, Black dkk., 2003; Klapper dan Love, 2002; Mitton, 2000; dan Darmawati dkk., 2004). Penelitian-penelitian tersebut secara tidak langsung juga menunjukkan kegunaan (*usefulness*) dari pemeringkatan praktik *corporate governance* di tingkat perusahaan yang sudah dilakukan di beberapa negara (termasuk Indonesia).

Menurut Berghe dan Ridder (1999) dalam penelitian sebelumnya, menghubungkan kinerja perusahaan dengan *good corporate governance* tidak mudah dilakukan. Beberapa penelitian menunjukkan tidak ada hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan, misalnya penelitian Daily dkk. (1998) dan hasil survey CBI, Deloitte dan Touche (1996) sebagaimana yang dikutip oleh Darmawati dkk (2004). Demikian juga dengan Young (2003) yang menganalisis beberapa penelitian yang menghubungkan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Di lain pihak, berdasarkan beberapa hasil penelitian, Berghe dan Ridder menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *poor performance* disebabkan oleh *poor governance*. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Gompers dkk (2003) dalam Darmawati (2004) yang menemukan hubungan positif antara indeks *corporate governance* dengan kinerja perusahaan jangka panjang. Menurut Kakabadse dkk, (2001) dalam Darmawati, (2004) perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 1) perspektif teoritis yang diterapkan 2) metodologi penelitian, 3) pengukuran kinerja, dan 4) perbedaan pandangan atas keterlibatan dewan dalam pengambilan keputusan. Walaupun penelitian-penelitian tentang hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda, namun

semuanya menyatakan bahwa *corporate governance* mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan.

Kepemilikan oleh institusional juga dapat menurunkan *agency costs*, karena dengan adanya monitoring yang efektif oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang menurun, Moh'd et al. (1998) dalam Midiastuti dan Machfudz, (2003). Namun Faisal (2005) menyatakan bahwa hubungan antara kepemilikan institusional dengan biaya keagenan (*agency costs*) adalah negatif, kepemilikan institusional belum efektif sebagai alat memonitor manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. makin banyaknya personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 1998, dan Jensen 1993). Beberapa peneliti lain menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba, makin sedikit dewan komisaris maka tindak kecurangan makin banyak karena sedikitnya dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut (Yu, 2006), Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) dan Xie, Davidson, dan Dadalt (2003).

Berkaitan dengan ukuran dewan direksi, beberapa peneliti menemukan hasil yang berbeda. Dalton et al. (1999) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan direksi dengan kinerja perusahaan. Sedangkan Eisenberg et al. (1998) menyatakan bahwa ada hubungan yang negatif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan.

Penelitian mengenai dampak dari independensi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan ternyata masih beragam. Ada penelitian yang menyatakan bahwa tingginya proporsi dewan luar berhubungan positif dengan kinerja perusahaan (Yermack, 1996; Daily & Dalton, 1993), bukan merupakan faktor dari kinerja perusahaan (Kesner & Johnson, 1990), dan berhubungan negatif dengan kinerja (Baysinger, Kosnik & Turk, 1991; Goodstein & Boeker, 1991).

Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian Cornett et al. (2006) di Amerika Serikat, dengan objek penelitian pada industri perbankan di Indonesia. Menurut Iskandar dan Chamlou (2000) dalam Lastanti (2004), mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu internal dan *external mechanisms*. *Internal mechanisms* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajemen. Sedangkan *external mechanisms* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti kualitas audit. Penelitian ini bertujuan menguji variabel *corporate governance* yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis di Indonesia (menggunakan ukuran yang dikembangkan oleh IICG). Sedangkan untuk kinerja keuangan diukur menggunakan *Cash flow return on assets* (CFROA).

1.2 Perumusan Masalah

Adanya *gap research* mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* secara internal dan eksternal terhadap kinerja keuangan mendorong

untuk melakukan suatu penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajemen terhadap kinerja keuangan?
4. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap kinerja keuangan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan.
3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajemen terhadap kinerja keuangan.
4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas audit terhadap kinerja keuangan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan menambah bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* secara internal dan eksternal terhadap kinerja keuangan sehingga Akuntansi Manajemen dan Perilaku semakin berkembang.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan memberikan informasi dan referensi pemerintah, auditor, mahasiswa akuntansi, dan masyarakat umum mengenai kinerja keuangan dalam hubungannya dengan mekanisme *corporate governance*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Mencakup landasan teori dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan isi pokok dari penelitian yang berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan sehingga dapat

diketahui hasil analisis yang diteliti mengenai hasil pengujian hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian berikutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002).

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai

manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004).

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002).

Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Penelitian Richardson (1998) menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba.

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan

dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

Perbankan adalah suatu industri yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan industri yang lain seperti manufaktur, perdagangan, dan sebagainya sehingga teori keagenan pada perusahaan perbankan mempunyai karakteristik sendiri. Perbankan adalah industri yang sarat dengan berbagai regulasi, hal ini karena bank adalah suatu lembaga perantara keuangan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Karena fungsinya tersebut maka risiko yang harus dihadapi bank sangat besar, ketidakmampuan untuk menjaga image (kualitas) akan sangat berpengaruh terhadap likuiditas bank.

Dengan adanya regulasi di dalam perbankan mengakibatkan hubungan keagenan industri ini berbeda dengan hubungan keagenan dalam perusahaan yang tidak teregulasi (Ciancenelli dan Gonzales dalam Supriyatno, 2006). Dengan adanya regulasi tersebut maka ada pihak lain yang terlibat dalam hubungan keagenan yaitu regulator dalam hal ini pemerintah melalui Bank Indonesia sehingga mengakibatkan masalah keagenan menjadi semakin kompleks. Moral hazard terhadap suatu regulasi yang muncul lebih menunjukkan lemahnya peraturan dibandingkan konflik antara manajer dan pemilik.

Dengan deregulasi justru akan semakin memperbesar *moral hazard* karena di satu sisi memberikan kebebasan bank untuk mengambil risiko bisnis yang lebih

besar dan di pihak lain, regulator menanggung sebagian risiko ini dari komitmen yang tidak dapat dipenuhi oleh bank karena regulator merupakan lembaga pemberi dana terakhir. Dalam teori keagenan, paling sedikit ada 3 asumsi yang mendasari (Ciancenelli dan Gonzales dalam Supriyatno, 2006), yaitu (1) pasar yang normal dan kompetitif, (2) *nexus* dari asimetri informasi adalah hubungan prinsipal-agen antara pemilik dan manajer, (3) struktur modal optimal menghendaki alat yang terbatas. Jika asumsi-asumsi tersebut di atas diterapkan dalam perbankan, maka ketiga asumsi di atas tidak akan terpenuhi semua sebab bank sangat teregulasi sehingga tidak akan tercapai pasar yang normal dan kompetitif.

Dengan adanya struktur modal yang kompleks di dalam perbankan maka paling sedikit ada tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi (Ciancenelli dan Gonzales dalam Supriyatno, 2006) yaitu: (1) hubungan antara deposan, bank dan regulator, (2) hubungan antara pemilik, manajer, dan regulator, serta (3) hubungan antara peminjam (*borrowers*), manajer, dan regulator. melibatkan regulator sehingga bank dalam bertindak akan memenuhi kepentingan regulator lebih dahulu dibandingkan pihak yang lain.

2.1.2 Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata

lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Sedangkan *Cadbury Committee* menyatakan *corporate governance* sebagai seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.

Berdasarkan definisi *good corporate governance* di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *good corporate governance* adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Sedangkan tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Manfaat *corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan dividen.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 1999 telah menerbitkan dan mempublikasikan *OECD Principles of Corporate Governance*. Prinsip-prinsip tersebut ditujukan untuk membantu para negara anggotanya maupun negara lain berkenaan dengan upaya-upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kerangka kerja hukum, institusional, dan regulatori *corporate governance* dan memberikan pedoman dan saran-saran untuk pasar modal, investor, perusahaan, dan pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam pengembangan *good corporate governance* (Darmawati, 2003). Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Hak-hak para pemegang saham

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham yaitu hak untuk (a) menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan (b) mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya (c) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur (d) ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS (e) memilih anggota dewan komisaris (f) memperoleh pembagian keuntungan perusahaan

2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham

Kerangka kerja *corporate governance* harus menjamin adanya kesetaraan perlakuan kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan

untuk mendapatkan perbaikan yang efektif atas penyimpangan dari hak-hak mereka.

3. Peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan

Kerangka kerja *corporate governance* harus mengakui hak-hak *stakeholders* seperti yang ditentukan oleh hukum dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dan *stakeholders* dalam penciptaan kesejahteraan, pekerjaan-pekerjaan, dan kemampuan untuk mempertahankan perusahaan yang sehat secara finansial.

4. Transparansi dan Keterbukaan

Kerangka kerja *corporate governance* harus menyakinkan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat telah dilakukan atas seluruh hal-hal yang material berkenaan dengan perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan ketaatan perusahaan (*governance of company*).

5. Peranan Dewan Komisaris

Kerangka kerja *corporate governance* harus menyakinkan pedoman strategik perusahaan, pemantauan yang efektif pada manajemen oleh dewan, dan akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Prinsip-prinsip dasar penerapan *good corporate governance* yang dikemukakan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) adalah sebagai berikut:

1. *Fairness* (keadilan). Menjamin adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa

semua pihak, yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diberlakukan sama.

2. *Transparency* (transparansi). Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para pemegang kepentingan (*stakeholders*).
3. *Accountability* (akuntabilitas). Menjelaskan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini menegaskan pertanggungjawaban manajemen terhadap perusahaan dan para pemegang saham.
4. *Responsibility* (pertanggungjawaban). Memastikan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat atau *stakeholders* dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat.

Peraturan No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas di bursa huruf C-1, dimana dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan yang baik (*good corporate governance*). Perusahaan tercatat wajib memiliki:

1. Komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris.

2. Komite Audit.
3. Sekretaris perusahaan.

2.1.3 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Menurut Iskandar dan Chamlou (2000) dalam Lastanti (2004), mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu internal dan *external mechanisms*. *Internal mechanisms* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan *external mechanisms* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar.

2.1.3.1 Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Secara langsung keberadaan Komisaris Independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan

pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta *stakeholder* lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya. Menurut *Task Force* Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Afiliasi berarti:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Misi komisaris independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholder* sebagai prinsip

utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka komisaris independen harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
2. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
3. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
5. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
6. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *good corporate governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik, yang dilakukan dengan cara:

- a. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
- b. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder yang lain.
- c. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
- d. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
- e. Menjamin akuntabilitas organ perseroan

Untuk memastikan Komisaris Independen dapat menjalankan tugasnya secara independen, Komisaris Independen harus memenuhi kriteria formal sebagai berikut:

1. Mampu melakukan perbuatan hukum.
2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit.
3. Tidak pernah dipidana karena merugikan keuangan negara.
4. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang bersangkutan.
5. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.
6. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
7. Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.

8. Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan professional pada perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi.
9. Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan Dewan Komisaris perusahaan pemasok dan pelanggan signifikan dari perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi.
10. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan perusahaan.
11. Memahami peraturan perundang-undangan PT, UU Pasar Modal dan UU serta peraturan-peraturan lain yang terkait.

Selain kriteria formal seperti disebutkan diatas, seorang Komisaris Independen harus memiliki beberapa kriteria dan kompetensi pribadi antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan kejujuran yang tidak diragukan.
2. Memahami seluk beluk pengelolaan bisnis dan atau keuangan perusahaan.
3. Memahami dan mampu membaca laporan keuangan perusahaan
4. Memiliki kepekaan terhadap perkembangan lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan.
5. Memiliki wawasan luas dan kemampuan berpikir strategis.

6. Memiliki karakter kepemimpinan, mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain.
7. Memiliki komitmen dan konsisten dalam melakukan profesinya sebagai komisaris independen.
8. Memiliki kemampuan untuk berpikir objektif dan independen secara profesional.

Untuk mendorong efektifitas Komisaris Independen, diperlukan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang harus dipatuhi oleh Komisaris Independen, sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan, dan jika keadaan tersebut tidak dapat dihindari harus diungkapkan secara wajar dan terbuka.
2. Mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (*insider trading*) untuk memperoleh keuntungan pribadi.
3. Tidak mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan selain gaji dan tunjangan yang diterima sebagai komisaris perusahaan.
4. Menjunjung tinggi integritas dan kejujuran sebagai nilai tertinggi.
5. Mempertimbangkan semua hal secara objektif, profesional dan independen demi kepentingan perusahaan dengan tidak melupakan kepentingan stakeholders.
6. Melaksanakan tugas secara amanah.
7. Mendorong penerapan prinsip good corporate governance.

8. Menghormati keputusan organ perusahaan: RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsi masing-masing.
9. Berorientasi untuk memberikan nilai tambah kepada perusahaan.
10. Menjaga informasi perusahaan yang bersifat rahasia.

Untuk lebih memantapkan efektifitas Komisaris Independen, jumlah komisaris independen dalam satu perusahaan ditetapkan paling sedikit 30% dari jumlah seluruh komisaris atau paling sedikit 1 (satu) orang. Menurut Peraturan Pencatatan nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa yaitu jumlah komisaris independen minimum 30%. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris (Kusumaning, 2004)

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 proporsi dewan komisaris independen sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Dapat dikatakan bahwa proporsi dewan komisaris yang terdiri dari anggota yang berasal dari luar perusahaan mempunyai kecenderungan mempengaruhi

manajemen laba. Pemikiran ini didukung hasil penelitian Klein (2006), Chtourou, dkk. (2001), dan Midiastuty dan Machfoedz (2003).

Komisaris independen diukur dengan proporsi antara jumlah komisaris independen dengan seluruh total anggota dewan komisaris perusahaan. Penelitian Evans, dkk (2002) melaporkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan positif yang secara statistik signifikan antara rasio komisaris independen dengan kinerja perusahaan. Penelitian FÜRST dan Kang (2004) menguji *corporate governance* dan kinerja operasi, menunjukkan adanya hubungan positif antara komisaris independen dengan kinerja perusahaan. Beasley (1996) menguji hubungan antara proporsi dewan komisaris dengan kecurangan pelaporan keuangan. Dengan membandingkan perusahaan yang melakukan kecurangan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan, mereka menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentase dewan komisaris eksternal yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan.

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance*, komposisi atau jumlah Komisaris Independen tidak ditentukan dalam jumlah tertentu namun

demikian jumlah atau komposisi komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria yang ditetapkan yaitu salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. Meskipun Pedoman *Good Corporate Governance* tidak menentukan jumlah Komisaris Independen, dalam Peraturan Bapepam-LK, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen sedangkan Bursa Efek Indonesia mewajibkan sekurang-kurangnya 30% dari Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan penuh atas pengurusan perusahaan. Fungsi dewan komisaris termasuk di dalamnya komisaris independen antara lain; melakukan pengawasan terhadap direksi dalam pencapaian tujuan perusahaan dan memberhentikan direksi untuk sementara bila diperlukan (Warsono, dkk., 2009).

Dewan komisaris adalah pihak yang berperan penting dalam menyediakan laporan keuangan perusahaan yang reliable. Keberadaan dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa yang dilakukan oleh manajer (Chtourou, dkk., 2001). Dewan komisaris menggambarkan puncak dari sistem pengendalian pada perusahaan besar, yang memiliki peran ganda yaitu peran untuk memonitor dan pengesahan (*ratification*). Fama dan Jensen dalam Kusumaning (2004) menyatakan bahwa pengendalian keputusan yang efektif merupakan fungsi positif dari rasio dewan komisaris eksternal dengan total keanggotaan dewan komisaris.

Tujuan dari aktivitas pengawasan oleh dewan komisaris eksternal adalah untuk memberikan signal kepada pasar mengenai reputasi aktivitas pengawasan yang efektif di dalam perusahaan.

Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer (Chtourou, dkk.,2001) atau dengan kata lain, semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

2.1.3.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan bagian lain dari mekanisme *corporate governance* pada perusahaan. Institusi mempunyai sumber daya, kemampuan dan kesempatan untuk memonitor dan mendisiplinkan manajer agar lebih terfokus pada nilai perusahaan. Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri. Dengan kata lain, kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga.

Komunitas bisnis menaruh perhatian yang besar untuk meningkatkan investor institusional di pasar sehingga dapat lebih banyak mempengaruhi kebijakan perusahaan. Institusi dengan kepemilikan saham yang relatif besar dalam perusahaan mungkin akan mempercepat manajemen perusahaan untuk menyajikan disclosure secara sukarela. Hal ini terjadi karena investor institusional dapat melakukan monitoring dan dianggap *sophisticated investors*

yang tidak mudah dibodohi oleh tindakan manajer. Institusi dengan investasi yang substansial pada saham perusahaan memperoleh insentif yang besar untuk secara aktif memonitor dan mempengaruhi tindakan manajemen seperti mengurangi fleksibilitas manajemen melakukan *abnormal accounting accrual*. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Schleiver dan Vishny (1986) Coffe (1991) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer dan memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang oportunistis.

Masalah keagenan utama dalam perusahaan dengan kepemilikan seperti ini adalah konflik antara pemegang perusahaan dengan pemegang saham minoritas. Apabila tidak terdapat hukum yang memadai, pemegang saham pengendali dapat melakukan aktivitas yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemegang saham lain (Tarjo, 2008).

Penelitian La Porta, dkk (1998) menunjukkan bahwa kepemilikan semua perusahaan publik di hampir semua negara adalah terkonsentrasi, kecuali di Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. La Porta, dkk (1998) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi di negara-negara dengan tingkat *corporate governance* yang rendah.

Investor institusional sering disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated*) seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibandingkan dengan investor non institusional. Balsam, dkk (dalam Veronica dan Utama, 2005) menyatakan bahwa

kepemilikan institusional yang tinggi dapat meminimalisir *earnings management* tergantung pada tingkat kecanggihan investor tersebut.

Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005). Pernyataan ini sesuai dengan Ujiyantho dan Pramuka (2007) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh institusional karena mereka dianggap sebagaisophisticated investor dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan dapat memonitor manajemen yang berdampak mengurangi motivasi manajer untuk melakukan *earnings management*.

Kepemilikan institusional diukur dari persentase antara saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan banyaknya saham yang beredar. Kepemilikan institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi (Beiner dkk., 2003). Jiambalvo dkk (1996) menemukan bahwa nilai absolut diskresioner berhubungan negatif dengan kepemilikan investor institusional. Gidion (2005) persentase saham tertentu yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Cornet *et al.*, (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

McConnell dan Servaes (1990), Nesbitt (1994), Smith (1996), Del Guercio dan Hawkins (1999), dan Hartzell dan Starks (2003) dalam Cornertt *et al.*, (2006) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor insitusional dapat membatasi perilaku para manajer. Mitra (2002), Koh (2003), dan Pratana dan Mas'ud (2003) juga menemukan bahwa kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba.

2.1.3.3 Kepemilikan Manajemen

Kepemilikan manajemen adalah saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya. Menurut Jensen (1993) kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan. Pemusatan kepentingan dapat dicapai dengan memberikan kepemilikan saham kepada manajer. Jika manajer memiliki saham perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik. Jika kepentingan manajer dan pemilik sejajar (*aligned*) dapat mengurangi konflik keagenan. Jika konflik keagenan dapat dikurangi, manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi hambatan kontraktual.

Tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi dapat menimbulkan masalah pertahanan. Artinya jika kepemilikan manajerial tinggi, mereka memiliki posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan dan pihak eksternal akan mengalami

kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. hal ini disebabkan karena manajer mempunyai hak voting yang besar atas kepemilikan manajerial yang tinggi.

McConnell (1990) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan pada level 40%-50% dan berhubungan negatif pada level lebih dari 50%. hal ini terjadi pada perusahaan kecil. Kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh yang berbeda pada perusahaan kecil dan perusahaan besar. Besar kecilnya jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham.

2.1.3.4 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan kualitas yang ditunjukkan dari suatu hasil audit. Auditing adalah bentuk monitoring yang digunakan oleh perusahaan untuk menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) perusahaan dengan pemegang hutang (*bond holder*) dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Nilai auditing timbul karena auditing menurunkan pelaporan yang salah atas informasi akuntansi (Ardiati, 2005). Hasil auditing ini dicerminkan dalam laporan keuangan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Hasil audit tidak bisa diamati secara langsung sehingga pengukuran variabel kualitas audit maupun kualitas auditor menjadi sulit untuk dioperasionalkan. Untuk mengatasi permasalahan ini, para peneliti terdahulu kemudian mencari indikator pengganti dari kualitas auditor. Dimensi kualitas auditor yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah ukuran kantor

akuntan publik atau KAP karena nama baik perusahaan (KAP) dianggap kredibel untuk mengungkap profesionalismenya.

Kualitas kantor akuntan publik, dalam penelitian ini mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang mengatur Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 perlu mengatur kembali Jasa Akuntan Publik dengan mengganti Keputusan Menteri Keuangan dengan Peraturan Menteri Keuangan, NOMOR: 17/PMK.01/2008 TENTANG JASA AKUNTAN PUBLIK, tentang Jasa Akuntan Publik pasal 1 Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Sehingga dalam penelitian ini jumlah partner (sekutu) yang mempunyai izin akuntan dalam badan usaha menjadi ukuran kualitas kantor akuntan publik yang menjadi sampel penelitian.

Kualitas kantor akuntan publik dalam penelitian ini juga mengacu pada KAP name atau *audit brand name* yang tercermin dari kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) dan Organisasi Audit Asing (OAA). KAP yang mencantumkan nama KAPA atau OAA pada nama kantor, kepala surat, dokumen, dan media lainnya diasumsikan sebagai *big KAP*, setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Spesialisasi industri adalah atas banyaknya jasa atestasi atau banyaknya klien industri sejenis dengan yang dikerjakan atau ditangani oleh auditor KAP dalam tahun pengamatan, juga menjadikan ukuran dalam penelitian ini kualitas kantor akuntan publik terhadap integritas informasi laporan keuangan. Aspek

spesialisasi industri ini dapat mempengaruhi kualitas audit oleh KAP, disamping karakteristik industri yang berpengaruh pada suatu perusahaan lebih besar dibanding perusahaan dengan perusahaan lain. Adanya perbedaan ini membutuhkan keahlian tertentu untuk bisa mendeteksi dengan lebih baik seberapa besar pengaruh tersebut (Mayangsari, 2003).

Kombinasi antara faktor-faktor khusus perusahaan dan industri menghasilkan variasi permintaan terhadap monitoring serta konsekuensinya pada kualitas audit (Craswell *et al.*, 1995) dalam Mayangsari, (2003). Spesialisasi industri yang dimiliki oleh kantor akuntan mempunyai dampak positif karena dapat meningkatkan *audit fee* (Francis dan Stokes 1986). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa auditor menawarkan berbagai tingkat kualitas audit untuk merespon adanya variasi permintaan klien terhadap kualitas audit. Penelitian-penelitian sebelumnya membedakan kualitas auditor berdasarkan perbedaan *big five* dan *non big five* dan ada juga yang menggunakan spesialisasi industri auditor untuk memberi nilai bagi kualitas audit ini seperti penelitian Mayangsari (2003).

Teoh (1993) berargumen bahwa kualitas audit berhubungan positif dengan kualitas *earnings*, yang diukur dengan *Earnings Response Coefficient* (ERC). Penelitian kali ini menilai kualitas auditor berdasarkan pengelompokkan auditor *big four* dengan *non big four*, dikarenakan salah satu KAP *big five* yaitu Arthur Andersen telah dinyatakan *collapsed*. Teori reputasi memprediksikan adanya hubungan positif antara ukuran KAP dengan kualitas audit (Lennox, 2000). Penelitian DeAngelo (1981) yang dikutip dari penelitian Lennox (2000)

mengemukakan bahwa KAP yang besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa auditor menawarkan berbagai tingkat kualitas audit untuk merespon adanya variasi permintaan klien terhadap kualitas audit. Penelitian-penelitian sebelumnya membedakan kualitas auditor berdasarkan perbedaan big five dan non big five dan ada juga yang menggunakan spesialisasi industri auditor untuk memberi nilai bagi kualitas audit ini seperti penelitian Mayangsari (2003).

2.1.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah alat untuk mengukur prestasi kerja keuangan perusahaan melalui struktur permodalannya. Tolak ukur yang digunakan dalam kinerja keuangan tergantung pada posisi perusahaan.

Penilaian kinerja keuangan perusahaan harus diketahui outputnya maupun inputnya. Output adalah hasil dari suatu kinerja karyawan, sedangkan input adalah hasil dari suatu keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Efektifitas apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi diartikan sebagai ratio (perbandingan) antara masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal.

Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan (Kieso dan Weygandt, 1995), sehingga laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang besar. Dalam hal ini arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang. Arus kas (*cash flow*) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan (Pradhono, 2004). *Cash flow return on assets* (CFROA) merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan CFROA tidak terikat dengan harga saham (Cornett et al., 2006).

2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.2.1 Komisaris Independen dan Kinerja Keuangan

Salah satu permasalahan dalam penerapan *good corporate governance* adalah adanya CEO yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Padahal fungsi dari dewan komisaris ini adalah untuk mengawasi kinerja dari dewan direksi yang dipimpin oleh CEO tersebut. Efektivitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan kekuatan CEO tersebut

sangat dipengaruhi oleh tingkat independensi dari dewan komisaris tersebut (Lorsch, 1989; Mizruchi, 1983; Zahra & Pearce, 1989).

Penelitian mengenai dampak dari independensi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan ternyata masih beragam. Ada penelitian yang menyatakan bahwa tingginya proporsi dewan luar berhubungan positif dengan kinerja perusahaan (Yermack, 1996; Daily & Dalton, 1993; Stearns & Mizruchi, 1993), bukan merupakan faktor dari kinerja perusahaan (Kesner & Johnson, (1990) dalam Bugshan (2005), dan berhubungan negatif dengan kinerja (Baysinger, Kosnik & Turk, 1991; Goodstein & Boeker, 1991).

Konteks independensi ini menjadi semakin kompleks dalam perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Pfeffer & Salancik (1978) menyatakan bahwa dengan semakin meningkatnya tekanan dari lingkungan perusahaan maka kebutuhan akan dukungan dari luar juga semakin meningkat. Selain itu, Daily & Dalton (1994) menyatakan bahwa apabila ada resistensi dari CEO untuk menerapkan strategi yang agresif untuk mengatasi kinerja perusahaan yang terus menurun, maka adanya direksi dari luar akan mendorong pengambilan keputusan untuk melakukan perubahan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan bahwa semakin tinggi representasi dewan dalam (insider board) maka keterlibatan direksi dalam pengambilan keputusan yang strategis akan semakin rendah (Judge & Zeithaml, 1992).

Penelitian mengenai keberadaan dewan komisaris telah dilakukan diantaranya Peasnell, Pope, dan Young (1998) meneliti efektifitas dewan komisaris dan komisaris independen terhadap manajemen laba yang terjadi di

Inggris. Dengan menggunakan sampel penelitian yang terdiri dari 1178 perusahaan selama periode tahun 1993-1996, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen membatasi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba. Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) meneliti peran dewan komisaris dengan latar belakang bidang keuangan dalam mencegah manajemen laba. Dari penelitian ini diketahui makin sering dewan komisaris bertemu maka akrual kelolaan perusahaan makin kecil. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persentase dewan komisaris dari luar perusahaan yang independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akrual kelolaan. Beasley (1996) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan.

Penelitian terkait dengan keberadaan dewan komisaris di Indonesia juga banyak dilakukan. Veronica dan Utama (2005) meneliti pengaruh praktik *corporate governance* terhadap manajemen laba. Praktik *corporate governance* yang diteliti yaitu proporsi dewan komisaris independen. Hasil dari penelitian ini adalah kesimpulan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Boediono (2005) meneliti apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara parsial pengaruh *corporate governance* dalam hal ini komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan

bahwa variabel persentase dewan komisaris independen tidak berkorelasi secara signifikan terhadap akrual kelolaan, walau begitu interaksi antar variabel akrual kelolaan dan dewan komisaris independen menunjukkan koefisien positif yang signifikan terhadap return perusahaan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan makin tingginya persentase dewan komisaris independen maka akrual kelolaan makin berpengaruh terhadap return.

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa non-executive director (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Hasil penelitian Dechow, Patricia, Sloan dan Sweeney (1996), Klein (2002), Peasnell, Pope dan Young (2001), Chtourou et al. (2001), Midiastuti dan Mackfudz (2003), dan Xie, Biao, Wallace dan Peter (2003) memberikan simpulan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau *outside director* dapat mempengaruhi kinerja. Sehingga, jika anggota dewan komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan dengan makin rendahnya penggunaan *discretionary accruals* (Cornett et al., 2006).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H1: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.2.2 Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan (*agency conflict*). Crutchley dan Hansen (1989), Bathala et al. (1994) dalam Faisal (2005) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan.

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *agency costs* dilakukan oleh Crutchley et al. (1999). Crutchley menyatakan bahwa kepemilikan oleh institusional juga dapat menurunkan *agency costs*, karena dengan adanya monitoring yang efektif oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang menurun. Hal ini karena peranan utang sebagai salah satu alat monitoring sudah diambil alih oleh kepemilikan institusional. Dengan demikian kepemilikan institusional dapat mengurangi *agency cost of debt*.

Moh'd et al. (1998) dalam Midiastuti dan Mackfudz (2003) menyatakan bahwa distribusi saham antara pemegang saham dari luar yaitu investor institusional dan *shareholders dispersion* dapat mengurangi *agency costs*. Adanya kepemilikan institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2005) diperoleh hasil yang berbeda. Faisal (2005) menyatakan bahwa hubungan antara kepemilikan institusional dengan biaya keagenan (*agency costs*) adalah negatif. Masih berdasarkan hasil penelitian Faisal

(2005) bahwa hal ini mengindikasikan kepemilikan institusional belum efektif sebagai alat memonitor manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.2.3 Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Keuangan

Faccio dan Ameziane (1999) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial dan struktur dewan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang diukur menggunakan *return on equity* (ROE). Kang dan Asghar (2000) dalam penelitiannya ditemukan bukti bahwa terdapat hubungan secara signifikan antara struktur kepemimpinan dewan dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *return on investment* (ROI). Maher dan Anderson (2001) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa *good corporate governance* selain dapat mempengaruhi kinerja perusahaan juga mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H3: Kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.2.4 Kualitas Audit dan Kinerja Keuangan

Masalah keagenan sebenarnya muncul ketika prinsipal kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Menurut teori keagenan, salah satu mekanisme yang secara luas digunakan dan diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme laporan keuangan. Menurut Blue Ribbon Committe (1999),

beberapa studi mengungkapkam hubungan antara independensi auditor dengan mengetahui tinggi kekeliruan dan mengurangi kejadian dalam laporan keuangan.

Auditor eksternal dianggap lebih independen dibandingkan dengan auditor internal. Oleh karena itu, auditor eksternal mempunyai peran yang penting dalam kerangka corporate governance. Salah satu fungsi utama auditor eksternal adalah menjamin berjalannya prosedur sebagaimana yang seharusnya (*compliance*) dan mencegah terjadinya transaksi keuangan dan kecurangan lain yang menyimpang (Arifin, 2005). Secara prinsip auditor eksternal harus ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari calon yang diajukan oleh dewan komisaris berdasarkan usulan komite audit.

Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh dewan komisaris, direksi, dan stakeholders. Perusahaan harus menyediakan bagi auditor eksternal semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-asasan dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Para auditor eksternal harus memberitahu perusahaan melalui komite audit mengenai kejadian dalam perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Tjager, 2008).

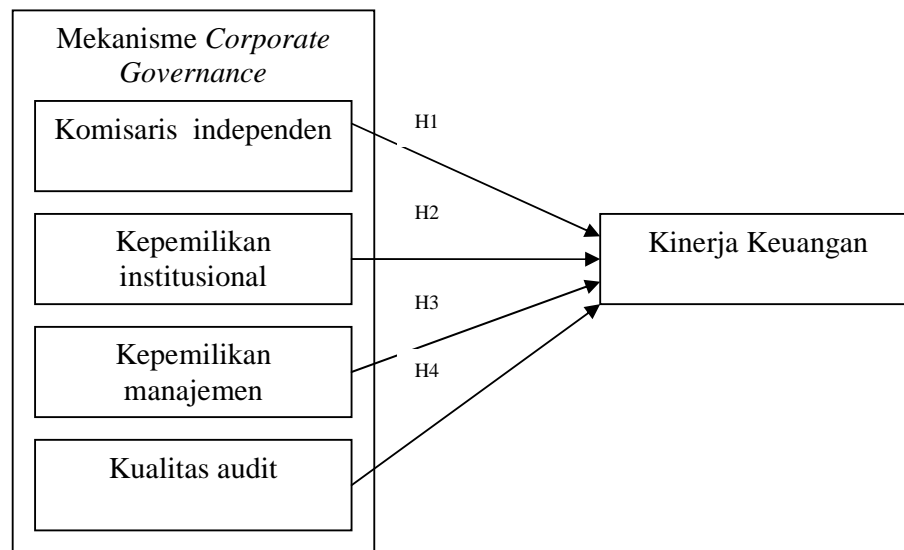
Kualitas audit yang diukur dengan menggunakan ukuran KAP. Beberapa peneliti sebelumnya, seperti Mayangsari (2003) mengungkapkan bahwa auditor menawarkan berbagai tingkat kualitas audit untuk merespon adanya variasi permintaan klien terhadap kualitas audit. Kualitas audit berhubungan positif dengan kualitas earning.

Teori reputasi memprediksi adanya hubungan positif antara ukuran KAP dengan kualitas audit (Lennox, 2000). KAP yang besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil. Oleh karena itu, dalam rangka mekanisme penerapan corporate governance, perusahaan yang memilih menggunakan auditor eksternal yang masuk ke dalam kelompok KAP besar akan cenderung lebih baik dalam menjalankan fungsi kontrol dalam melakukan proses audit.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keempat yang diajukan adalah:

H4: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan uraian di atas dapat disusun kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi dari unit-unit sosial yang menjadi subjek. Tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, atau pun status dari individu, yang kemudian, dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Hasil dari studi kasus adalah suatu generalisasi dari pola-pola kasus yang tipikal dari individu, kelompok, lembaga dan sebagainya. Selain itu, studi kasus menekankan mengkaji variabel yang cukup banyak pada jumlah unit yang lebih kecil.

Selanjutnya, desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu suatu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data angka yang diolah dengan metode statistika tertentu (Azwar, 1998). Dengan kata lain, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya bersifat angka.

Variabel Penelitian

Variabel Tergantung

Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *cash flow return on asset* (CFROA). CFROA dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi dengan total aktiva.

$$\text{CFROA} = \frac{\text{EBIT} + \text{Dep}}{\text{Assets}}$$

Keterangan:

CFROA = *Cash flow return on assets*

EBIT = Laba sebelum bunga dan pajak

Dep = Depresiasi

Assets = Total aktiva

Variabel Bebas

Mekanisme *corporate governance* adalah seperangkat mekanisme di mana investor luar melindungi diri terhadap pengambil-alihan oleh orang dalam. Mekanisme *corporate governance* diukur dengan menggunakan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kualitas audit.

1. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak

semata-mata demi kepentingan perusahaan. Hal tersebut diukur dari proporsi jumlah komisaris independen terhadap jumlah seluruh komisaris.

2. Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga baik yang berada di dalam maupun di luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri. Hal tersebut diukur dari persentase antara saham yang dimiliki institusi dibagi dengan banyaknya saham yang beredar.
3. Kepemilikan manajemen adalah saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya. Hal tersebut diukur dari persentase antara saham yang dimiliki manajemen dibagi dengan banyaknya saham yang beredar

4. Kualitas audit

Kualitas audit merupakan kualitas yang ditunjukkan dari suatu hasil audit laporan keuangan. Kualitas audit diukur dengan menggunakan proksi skala auditor yang diukur dengan menggunakan variabel *dummy* 1 untuk KAP yang berafiliasi dengan *Big Four*, dan 0 untuk KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big Four*. *Big Four* yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Praptitorini dan Januarti, 2007) :

- a. *Price Water House Coopers* (PWC) dengan partnernya di Indonesia Drs. Hadi Sutanto dan Rekan.
- b. *Delloitte Touche Tohmatsu* dengan partnernya di Indonesia Hans, Tuanakotta dan Mustofa.

- c. *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) International dengan partnernya di Indonesia Siddharta, Siddharta, dan Harsono.
- d. *Ernest and Young* (EY) dengan parternya di Indonesia Hanadi, Sarwoko, dan Sandjaja.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dari tahun 2006 – 2009. Sektor perbankan dipilih untuk menghindari adanya *industrial effect* yaitu risiko industri yang berbeda antara suatu sektor industri yang satu dengan yang lain, apalagi terdapat aturan-aturan tertentu yang berkaitan perbankan.

Pemilihan dan pengumpulan perusahaan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *purposive sampling* melalui beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan perbankan *go public* yang terdaftar di BEI dan mempublikasikan laporan keuangan auditan per 31 Desember secara konsisten dan lengkap dari tahun 2006-2009 dan tidak didelisting selama periode pengamatan penelitian. Penelitian ini menggunakan empat tahun pengamatan karena data tersebut dianggap sudah cukup untuk memberikan proyeksi.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian. Alasannya, kriteria ini untuk kelengkapan data yang berkaitan dengan data yang digunakan sesuai model penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) dan data yang ada di Pojok BEJ UNDIP Semarang untuk laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009. Oleh karena itu, cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan auditan perusahaan yang dipublikasikan oleh BEI melalui *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh sehingga dihasilkan suatu hasil analisis (Suryabrata, 2000). Hal ini disebabkan data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara langsung tetapi perlu diolah agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang dapat dipahami, jelas, dan teliti. Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah :

3.5.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian, yang mencakup nilai rata-rata, maksimum, minimum dan standar deviasi. Lebih lanjut, analisis deskriptif ini tidak bertujuan untuk pengujian hipotesis (Azwar, 1998).

3.5.2 Analisis Regresi Ganda dengan *Dummy*

Analisis regresi ganda digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan. Mengingat penelitian ini menggunakan empat variabel bebas dimana salah satunya memiliki jenis data kategori, maka persamaan regresi ganda dengan *dummy* sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 DX_4 + e$$

Keterangan:

Y	: Kinerja keuangan
β_0	: Bilangan konstanta
β_1	: Koefisien arah regresi komisaris independen
β_2	: Koefisien arah regresi kepemilikan institusional
β_3	: Koefisien arah regresi kepemilikan institusional
β_4	: Koefisien arah regresi kepemilikan manajemen
X_1	: Komisaris independen
X_2	: Kepemilikan institusional
X_3	: Kepemilikan manajemen
X_4	: Kualitas audit
e	: <i>Error disturbance</i>

Interpretasi hasil analisis regresi sebagai berikut :

1. Uji F

Output hasil uji F dilihat untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung) secara keseluruhan (Gujarati, 1999). Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat dipilih yaitu :

a. Membandingkan F hitung dengan F tabel

F hitung $<$ F tabel maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel tergantung secara signifikan.

F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tergantung secara signifikan.

b. Melihat *probabilities values*

Probabilities value $>$ derajat keyakinan (0,05) maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel tergantung secara signifikan.

Probabilities value $<$ derajat keyakinan (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tergantung secara signifikan.

2. Uji t

Output hasil uji t dilihat untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel tergantung, dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan (Gujarati, 1999). Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat dipilih yaitu :

a. Membandingkan t hitung dengan t tabel

t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel tergantung

t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel tergantung.

b. Melihat *probabilities values*

Probabilities value $>$ derajat keyakinan (0,05) maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel tergantung.

Probabilities value $<$ derajat keyakinan (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel tergantung.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentasi besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Pedoman untuk melihat hal tersebut adalah :

$$\text{Sumbangan Efektif (SE)} = \text{Adjusted R Square} \times 100 \%$$

3.6.2.1 Uji Asumsi Klasik

Setelah mendapatkan model regresi, maka interpretasi terhadap hasil yang diperoleh tidak bisa langsung melakukan. Hal ini disebabkan karena model regresi harus diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) (Deni, 2007). Uji asumsi klasik mencakup hal sebagai berikut (Ghozali, 2007):

1. Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel tergantung dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan *Normal P-Plot*.

Distribusi data dinyatakan normal apabila nilai p dari *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* $> 0,05$, dan sebaliknya. Sedangkan, *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual* apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Bila angka VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadinya multikolinieritas.

3. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Untuk dapat mendeteksi adanya autokorelasi maka akan digunakan metode pengujian Durbin Watson. Apabila nilai Durbin Watson

(DW) berada pada nilai $du < DW < (4-du)$ berarti model regresi terbebas dari masalah autokorelasi.

4. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Glejser. Uji Glejser adalah meregresikan antara variabel bebas dengan variabel *residual absolute*, dimana apabila nilai $p > 0,05$ maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas.